

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat - Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Sampai Dengan Triwulan IV pada unit kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja BKD Kota Depok Tahun 2020 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BKD. Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV, juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk implementasi dan sasaran kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada tahun anggaran selanjutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunannya. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah pada tahun yang akan datang.

Depok,

2020

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK



NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
NIP. 196608271986032006



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	6
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN	8
2.1 Visi dan Misi	8
2.2 Tujuan dan Sasaran	10
2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020	11
2.4 Perbandingan Antara Program / Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah	15
BAB III CAPAIAN KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Sasaran	20
3.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	22
3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan	26
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	30
4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja	30
4.2 Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan / RKPD berikutnya	30
BAB V PENUTUP	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Rekomendasi	32

DAFTAR TABEL

		Hal
TABEL 2.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah	11
TABEL 2.3	Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2020	12
TABEL 2.4	Perbandingan Program dan Kegiatan pada Renja 2020 dengan Perubahan Renstra 2016 – 2021 Badan Keuangan Daerah	17
TABEL 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Daerah Sampai dengan Triwulan IV	20
TABEL 3.2	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Sampai dengan Triwulan IV	23
TABEL 3.3	Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan Badan Keuangan Daerah Sampai dengan Triwulan IV	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah telah mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam proses pembangunan, pemerintah sebagai induk dalam roda pemerintahan secara nasional membuat Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang merupakan pedoman capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stake holder yang terlibat pada skala nasional. Selanjutnya RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, maka perlu adanya sinergitas antara RPJMD dan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) di seluruh perangkat daerah. Untuk memastikan sinergitas dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap kepala perangkat daerah menyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Hasil Renja Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2025;



7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Depok Nomor **Tahun** 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Hasil Renja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Tahun 2020.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Hasil Renja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV antara lain :

- a. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2020.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok untuk meningkatkan kinerja yang diamanatkan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN



Membahas dan menjabarkan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyajian laporan hasil perangkat daerah Tahun 2020 pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

BAB II. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Membahas dan menjabarkan mengenai visi dan misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan Tahun 2020, perbandingan antara program / kegiatan dalam renja perangkat daerah dan renstra perangkat daerah.

BAB III. CAPAIAN KINERJA

Membahas dan menjabarkan mengenai capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program dan kegiatan serta capaian target kinerja dan penyerapan dana program kegiatan.

BAB IV. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Membahas dan menjabarkan faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta tindak lanjut bagi pelaksanaan triwulan / RKPD berikutnya

BAB V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dan rekomendasi atas capaian kinerja Renja Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1. VISI DAN MISI

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, pasal 272 ayat (2) disebutkan bahwa Renstra tidak dimulai dari visi dan misi, namun langsung pada tujuan, sasaran dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa visi dan misi Perangkat Daerah adalah sama dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi adalah rumusan umum kondisi masa depan mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, maka Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok sesuai dengan visi Kota Depok adalah **“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius ”**.

Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai : terjaminnya hak - hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing – masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Kota Depok tersebut maka telah dirumuskan 5 (lima) Misi Kota Depok yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan
4. Membangun infratraktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

Mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021, terdapat dua visi Kota Depok yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Misi ke I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.
Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Sasaran yang akan dicapai Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik; dengan indikator kinerja Opini WTP
2. Misi ke III : Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan yang terpadu.
Tujuan dari Misi ini yang berkaitan dengan BKD adalah Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal yang kokoh dan berkeadilan. Sasaran yang akan dicapai Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas; dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi.



2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Badan Keuangan Daerah yaitu antara Tahun 2016 – 2021. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

Tujuan Misi I (Pertama) adalah : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran

Sasaran dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; dengan indikator sasaran : Opini BPK
2. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik; dengan indikator sasaran :
 - a. Predikat SAKIP BKD

b. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pembayaran Pajak Daerah

MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan

Tujuan Misi III (Ketiga) adalah : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran

Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD; dengan indikator sasaran: Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD.

Secara sistematis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel dibawa ini:

TABEL 2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2020
MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik	Predikat Sakip BKD	BB
			Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	Sangat Baik
MISI 3 : Mengembangkan Ekonomi yang Kokoh dan Berkeadilan	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	77.99%

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Program Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2020 serta Peraturan Walikota Depok Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Depok Tahun 2020.

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok, program dan kegiatan BKD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :



APBD Murni Tahun 2020

- Program : 9 program
- Kegiatan : 47 kegiatan
- Pagu : Rp 13.279.835.850,00

Pada Tahun 2020 Kota Depok menjadi salah satu daerah yang terkena wabah Covid-19 mengingat Kota Depok bersebelahan dengan Kota Jakarta. Pada April 2020 telah dilaksanakan Refocusing Anggaran Kegiatan Tahun 2020 untuk semua Perangkat Daerah di Kota Depok yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Depok. Refocusing ini berimplikasi dengan berkurangnya jumlah pagu anggaran serta ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2020. Berikut rincian pagu kegiatan Badan Keuangan Daerah setelah di refocusing :

APBD Tahun 2020 BKD setelah Refocusing untuk Covid-19

- Program : 8 program
- Kegiatan : 39 kegiatan
- Pagu Akhir Hasil Refocusing : Rp 9.065.230.200,00

Pada APBD Perubahan Tahun 2020 Badan Keuangan Daerah Kota Depok memiliki Jumlah Program Kegiatan sebagai berikut :

- Program : 8 program
- Kegiatan : 39 kegiatan
- Pagu APBD Perubahan : Rp 9.564.813.500,00

Adapun rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN AWAL	HASIL REFOCUSING	APBD PERUBAHAN
I.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.	Penyediaan Makanan dan	Penyediaan Makanan dan	Penyediaan Makanan dan



	Minuman	Minuman	Minuman
6.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
III	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
IV.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
4.	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan
5.	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	Penerbitan SP2D se-Kota Depok
6.	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah
7.	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah



8.	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
10.	Sertifikasi Aset tanah	Sertifikasi Aset tanah	Sertifikasi Aset tanah
11.	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok
12.	Pemeliharaan Kendaraan Pool	Pemeliharaan Kendaraan Pool	Pemeliharaan Kendaraan Pool
13.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah
14.	Penelitian RKA SKPD dan RKA - P SKPD	Penelitian RKA SKPD dan RKA - P SKPD	Penelitian RKA SKPD dan RKA - P SKPD
15.	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD
16.	Penatusahaan Gaji Pegawai	Penatusahaan Gaji Pegawai	Penatusahaan Gaji Pegawai
V.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
1.	Evaluasi ISO BPHTB	Evaluasi ISO BPHTB	Evaluasi ISO BPHTB
VI	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika
1.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
3.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB
4.	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset
5.	Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D Online	-	-
6.	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum dan Sarana Pemerintahan	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum dan Sarana Pemerintahan	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum dan Sarana Pemerintahan
7.	Pembuatan Sistem Barcode Pajak Reklame	-	-
VII	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	-	-
1.	Bimbingan Teknis Penyusunan	-	-



	Laporan Keuangan		
2.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	-	-
3.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-
4.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB BPHTB	-	-
VIII	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Peningkatan Kualitas Perencanaan
1.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
IX	Peningkatan Penerimaan PAD	Peningkatan Penerimaan PAD	Peningkatan Penerimaan PAD
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
2.	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB
3.	Penagihan PBB dan BPHTB	Penagihan PBB dan BPHTB	Penagihan PBB dan BPHTB
4.	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah
5.	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB
6.	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Non BPHTB	-	-
7.	Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam rangka KTMDU	Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam rangka KTMDU	Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam rangka KTMDU
8.	Pendataan dan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Kecamatan Cipayung	-	-

2.4. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM / KEGIATAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung Misi ke-1 dari Perubahan RPJMD Kota Depok terdapat 2 sasaran strategis dalam Perubahan Renstra BKD Tahun 2016 – 2021 yang dilaksanakan melalui 8 program. Sedangkan untuk mendukung Misi ke-3 terdapat 1 sasaran strategis yang dilaksanakan melalui 1 program. Semua program yang dalam Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 seluruhnya sudah sesuai dengan program yang tercantum dalam Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesesuaian Program dalam kedua dokumen tersebut sebesar 100 %.



Adapun untuk kegiatan terdapat perbedaan antara Renja BKD Tahun 2020 dan Perubahan Renstra BKD Tahun 2016 – 2021. Hal ini karena belum dilakukan penyesuaian antara dokumen renja dengan matriks program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renstra BKD tersebut. Perbedaan itu antara lain karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2020 yaitu Sinkronisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Pemeliharaan dan Pengembangan SIMGAJI dan SIMPEG. Untuk kegiatan Sinkronisasi Barang Milik Daerah diganti dengan kegiatan baru yaitu Inventarisasi Barang Milik Daerah. Untuk Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan SIMGAJI dan SIMPEG hanya dilaksanakan sampai dengan Tahun 2017 dan selanjutnya mulai Tahun 2018 berganti menjadi Kegiatan Penatausahaan Gaji Pegawai. Sedangkan untuk Kegiatan Pelaksanaan ISO, pada Tahun 2020 dilakukan ISO untuk BPHTB sehingga nama kegiatan disesuaikan menjadi Evaluasi ISO BPHTB. Pada Tahun 2020 terdapat 5 (lima) kegiatan baru yang tidak terdapat pada Renstra yaitu, Bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah Non PBB BPHTB, Pembuatan sistem barcode pajak reklame, Pemeriksaan wajib pajak daerah non PBB BPHB, penyelenggaraan operasi gabungan dalam rangka KTMDU dan Pendataan dan pemutakhiran objek PBB-P2 Keamatan Cipayung.



TABEL 2.4 PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA PERUBAHAN 2020 DENGAN PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK				
No.	RENSTRA 2016-2021	No.	RENJA PERUBAHAN 2020	Keterangan
	Program/Kegiatan		Program/Kegiatan	
I	Peningkatan Administrasi Perkantoran	I	Peningkatan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor	1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
III	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	III	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	
1	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	1	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	
2	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	2	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	
3	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran	3	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran	
4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB BPHTB	Judul Kegiatan Baru



No.	RENSTRA 2016-2021	No.	RENJA PERUBAHAN 2020	Keterangan
	Program/Kegiatan		Program/Kegiatan	
IV	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	IV	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	
V	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	V	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	
4	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	4	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	
5	Penelitian RKA SKPD dan RKA - P SKPD	5	Penelitian RKA SKPD dan RKA - P SKPD	
6	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	6	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	
7	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	7	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	
8	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	8	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	
9	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	9	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	
10	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	10	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
12	Sertifikasi Aset tanah	12	Sertifikasi Aset tanah	
13	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	13	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	
14	Pemeliharaan Kendaraan Pool	14	Pemeliharaan Kendaraan Pool	
15	Sinkronisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	15	-	Tidak dilaksanakan
16	Inventarisasi Barang Milik Daerah	16	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
17	Penatusahaan Gaji Pegawai	17	Penatusahaan Gaji Pegawai	



No.	RENSTRA 2016-2021	No.	RENJA PERUBAHAN 2020	Keterangan
	Program/Kegiatan		Program/Kegiatan	
VI	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	VI	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	
1	Evaluasi ISO	1	Evaluasi ISO BPHTB	Perubahan Judul
VII	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	VII	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	2	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	
4	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Faso Fasum dan Sarana	4	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Faso Fasum dan Sarana Pemerintahan	
5	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	5	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	
6	Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D Online	6	Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D Online	
7	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMGAJI DAN SIMPEG	7	-	Tidak dilaksanakan
			Pembuatan Sistem Barcode Pajak Reklame	Judul Kegiatan Baru
VIII	Peningkatan Kualitas Perencanaan	VIII	Peningkatan Kualitas Perencanaan	
1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	
IX	Peningkatan Penerimaan PAD	IX	Peningkatan Penerimaan PAD	
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	
2	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	2	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	
3	Penagihan PBB dan BPHTB	3	Penagihan PBB dan BPHTB	
4	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	4	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	
5	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	5	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	
6		6	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Non PBB BPHTB	Judul Kegiatan Baru
7		7	Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam rangka KTMDU	Judul Kegiatan Baru
8		8	Pendataan dan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Kecamatan Cipayung	Judul Kegiatan Baru



BAB III CAPAIAN KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 -2021 sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100	Hasil Opini BPK
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik	Predikat SAKIP BKD	BB	-	-	Hasil LHE atas SAKIP BKD Tahun 2020 baru akan diketahui pada awal Tahun 2021, Capaian Tahun 2019 adalah BB
		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	Sangat Baik	-	-	Hasil survei IKM terhadap pembayaran pajak daerah baru di publikasikan pada Tri Wulan I Tahun 2021
3.	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	77,99%	90,43%	115.95	Berdasarkan data Penerimaan sd SEPTEMBER 2020
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN S.D. TRIWULAN IV					70	

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis dalam Perubahan Renstra BKD belum tercapai dengan baik. Capaian kinerja dari 3 sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Indikator kinerja sasaran ini adalah Opini BPK. Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)
- c. Kepatuhan terhadap perundang undangan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemerintah Kota Depok telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali secara berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) , dan terakhir atas LKPD Tahun 2018. Opini WTP adalah opini tertinggi dari BPK yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material dan berdasarkan bukti bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum secara baik, dan walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusannya. Tahun 2020 untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019 hasilnya adalah WTP untuk ke sembilan kali.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik

Pada sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja yaitu :

1. Predikat SAKIP BKD

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja. Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, hasil



Evaluasi SAKIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 memiliki Nilai BB dengan skor penilaian sebesar 70.13 setelah di evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kota Depok.

2. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat 9 parameter yang digunakan dalam pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yaitu: (1) Persyaratan, (2) Prosedur, (3) Waktu Pelayanan, (4) Biaya / Tarif, (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7) Perilaku Pelaksana, (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, (9) Sarana dan Prasarana. Berdasarkan pengukuran SKM di badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2020 hasilnya baru akan diketahui pada awal tahun 2021.

Sasaran 3 : Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 3 sumber penerimaan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain - lain PAD yang Sah. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Sampai dengan Triwulan IV (Data Rekonsiliasi per 28 Desember 2020), realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak daerah adalah sebesar Rp.942.921.019.007,00, sedangkan realisasi total PAD adalah sebesar Rp.1.042.652.858.016,00, sehingga proporsi pajak daerah terhadap PAD adalah 90,43%.

3.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2020, Badan Keuangan Daerah setelah melakukan refocusing anggaran dan perubahan kegiatan melaksanakan 8 program dan 39 kegiatan. Sampai dengan triwulan IV, realisasi kinerja program telah tercapai 95 %. Sedangkan realisasi fisik kegiatan telah tercapai 95 %. Sedangkan Secara rinci, capaian kinerja program dan



kegiatan Tahun 2020 sampai dengan triwulan IV berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**TABEL 3.2 CAPAIAN KINERJA PROGAM DAN KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100
001.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	102 Jenis	102 Jenis	100
001.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	42 Jenis	42 Jenis	100
001.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18 Jenis	18 Jenis	100
001.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	26 Jenis	26 Jenis	100
001.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	10 Jenis	10 Jenis	100
001.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	425 Orang	304 Orang	95
002	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100
002.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	37 Unit	37 Unit	100
002.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	8 Jenis	100
002.07	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 Jenis	8 Jenis	100
005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	-	-	-
005.03	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Peserta	-	-	-
005.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Jumlah Peserta	-	-	-
005.06	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta	-	-	-
005.07	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB BPHTB	Jumlah Peserta	-	-	-
006	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NILAI SAKIP	BB	-	-
006.01	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100
017	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan	Status Laporan	WTP	WTP	100



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Aset Daerah				
017.01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
017.02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
017.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100
017.05	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
017.11	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
017.13	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pendapatan Daerah Non PAD	2 Laporan	2 Laporan	0
017.15	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset	30 Dokumen	30 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Penghapusan Aset	5 Dokumen	5 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Penilaian Aset	1 Dokumen	1 Dokumen	
017.17	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	Jumlah Dokumen Penyerahan	30 Dokumen	30 Dokumen	100
017.19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	4 Balai Rakyat	4 Balai Rakyat	100
017.20	Sertifikasi Aset tanah	Jumlah Bidang yang terukur	100 Bidang	41 Bidang	60
		Jumlah dokumen penelitian tanah	100 Dokumen	41 Dokumen	
017.24	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah Plang Papan Nama Aset	120 Buah	120 Buah	100
		Jumlah Patok Batas Tanah	300 Buah	300 Buah	
017.25	Pemeliharaan Kendaraan Pool	Jumlah Kendaraan	20 Unit	20 Unit	100
017.27	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Didata	3 Jenis	3 Jenis	100



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Jumlah Dokumen Kajian	1 Dokumen	1 Dokumen	
017.28	Penelitian RKA SKPD dan RKA - P SKPD	Jumlah Dokumen	129 Dokumen	129 Dokumen	100
017.29	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	100
017.31	Penatusahaan Gaji Pegawai	Jumlah PD	38 PD	38 PD	100
021	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit layanan terkreditasi	30%	30%	100
021.04	Evaluasi ISO BPHTB	Jumlah Evaluasi	1 Unit Layanan	1 Unit Layanan	100
022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan layanan e-government yang terintegrasi	100%	100%	100
022.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100
022.04	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	Jumlah Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100
022.06	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	Jumlah Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100
022.09	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
022.12	Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D Online	-	-	-	-
022.17	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum dan Sarana Pemerintahan	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
022.19	Pembuatan Sistem Barcode Pajak Reklame	-	-	-	-
028	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan	100%	100%	100
028.01	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
085.	Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	41.49	37.89	91.32
085.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah WP tersosialisasi	60 WP	60 WP	100
		Jumlah WP baru terjaring	120 WP	120 WP	
		Jumlah Banner	500 Buah	500 Buah	



KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Jumlah Stiker	1500 Lembar	1500 Lembar	
085.04	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah WP PBB dan BPHTB terverlap	1.000 WP	1.000 WP	100
		Jumlah spanduk peringatan jatuh tempo PBB	140 Buah	140 Buah	
		Jumlah spanduk sosialisasi	80 Buah	80 Buah	
		Jumlah data PBB potensial	500 Objek Pajak	240 Objek Pajak	
		Jumlah Tenaga Pendukung	17 Orang	17 Orang	
085.05	Penagihan PBB dan BPHTB	Jumlah pengiriman surat tagihan/himbauan/SPPT melalui Petugas Lapangan	620.000 WP	620.000 WP	100
		Jumlah hari pelayanan jatuh tempo	5 hari	5 hari	
		Jumlah Pengiriman SPPT melalui POS	4.650 WP	4.650 WP	
085.06	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP Penerima Penghargaan	25 WP	25 WP	100
		Jumlah Kelurahan Penerima Penghargaan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	
		Jumlah RT/RW Penerima Penghargaan	3 RT dan 3 RW	3 RT dan 3 RW	
		Jumlah PPAT Penerima Penghargaan	3 PPAT	3 PPAT	
085.07	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	Jumlah WP Tertagih	60 WP	60 WP	100
		Jumlah SKPD/STPD / Surat Teguran Terkirim	3.500 WP	3.500 WP	
085.08	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Non PBB BPHTB	-	-	-	-
085.09	Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam rangka KTMDU	Jumlah Laporan Hasil Operasi Gabungan	2 Laporan	2 Laporan	100
085.10	Pendataan dan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Kecamatan Cipayung	-	-	-	-
		-	-	-	-

3.3. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN

Anggaran Belanja Langsung Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 pada APBD Perubahan adalah sebesar Rp 9.564.813.500,00 . Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp 8.095.474.293,00 atau 84.63 %. Rincian penyerapan

program dan kegiatan Tahun 2020 sampai dengan triwulan IV berdasarkan target yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.3. PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN									
BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020									
SAMPAI DENGAN TRI WULAN IV (APBD PERUBAHAN)									
NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN KAS S.D. TRIWULAN IV	DANA TERSERAP	REALISASI KEUANGAN (%)		SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI
					THD ANGKAS TW IV	THD TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	BADAN KEUANGAN DAERAH	9.564.813.500	9.564.813.500	8.094.836.043	84,63	84,63	1.469.977.457		
001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.781.012.900	1.781.012.900	1.605.311.139	90,13	90,13	175.701.761		
001.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	570.000.000	570.000.000	508.911.586	89,28	89,28	61.088.414	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
001.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	459.999.900	459.999.900	442.731.500	96,25	96,25	17.268.400	Penyerapan sesuai kebutuhan	
001.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.000	9.992.000	9.992.000	100,00	100,00	-	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
001.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.999.000	43.999.000	43.981.000	99,96	99,96	18.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
001.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	284.922.000	284.922.000	225.076.000	79,00	79,00	59.846.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
001.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	412.100.000	412.100.000	374.619.053	90,90	90,90	37.480.947	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
002	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	507.454.000	507.454.000	427.131.967	84,17	84,17	80.322.033		
002.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor	169.400.000	169.400.000	111.190.967	65,64	65,64	58.209.033	Adanya pandemi covid 19 mengakibatkan berkurangnya mobilitas kendaraan yang dipakai	-
002.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	209.958.000	209.958.000	208.656.000	99,38	99,38	1.302.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
002.07	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.096.000	128.096.000	107.285.000	83,75	83,75	20.811.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-		
005.03	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	-	Refocusing anggaran covid-19	Kegiatan dihapus
005.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	Refocusing anggaran covid-19	Kegiatan dihapus
005.06	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	Refocusing anggaran covid-19	Kegiatan dihapus
005.07	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB BPHTB	-	-	-	-	-	-	Refocusing anggaran covid-19	Kegiatan dihapus

Laporan Hasil Renja
Badan Keuangan Daerah Kota Depok
Tahun 2020 S.D Triwulan IV



NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN KAS S.D. TRIWULAN IV	DANA TERSERAP	REALISASI KEUANGAN (%)		SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI
					THD ANGKAS TW IV	THD TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
006	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.000.000	41.000.000	38.082.000	92,88	92,88	2.918.000		
006.01	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	41.000.000	41.000.000	38.082.000	92,88	92,88	2.918.000	-	-
017	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.466.009.900	2.466.009.900	1.903.762.845	77,20	77,20	562.247.055		
017.01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	49.999.900	49.999.900	41.922.800	83,85	83,85	8.077.100	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
017.02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	176.005.900	176.005.900	144.481.000	82,09	82,09	31.524.900	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
017.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	274.999.900	274.999.900	204.032.270	74,19	74,19	70.967.630	Penyerapan sesuai kebutuhan dan adanya efisiensi dari belanja cetak	-
017.05	Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS Perubahan	158.999.900	158.999.900	87.706.900	55,16	55,16	71.293.000	Sewa kamar tidak diserap karena adanya pandemi covid 19	-
017.11	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	115.846.800	115.846.800	113.966.800	98,38	98,38	1.880.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
017.13	Penatausahaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	88.210.900	88.210.900	27.816.900	31,53	31,53	60.394.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
017.15	Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	125.000.000	125.000.000	50.111.100	40,09	40,09	74.888.900	Penghapusan aset baru akan terealisasi tahun depan bekerjasama dengan kantor piutang lelang negara Kemenkeu, Jasa konsultan penilaian pemanfaatan ada yang tidak terserap karena kerjasama belum terealisasi tahun ini	-
017.17	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, Permukiman dan TPU	14.999.500	14.999.500	14.999.500	100,00	100,00	-	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
017.19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	400.899.900	400.899.900	350.735.125	87,49	87,49	50.164.775	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
017.20	Sertifikasi Aset tanah	219.902.000	219.902.000	109.649.500	49,86	49,86	110.252.500	Terkendala covid 19 dimana BPN beberapa kali lock down, berkas usulan yang belum lengkap menurut BPN, BPN ada beban PTL dari Pemerintah Pusat, Kekurangan	-
017.24	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	324.999.000	324.999.000	318.520.800	98,01	98,01	6.478.200	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
017.25	Pemeliharaan Kendaraan Pool	149.900.000	149.900.000	148.593.700	99,13	99,13	1.306.300	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
017.27	Inventarisasi Barang Milik Daerah	228.390.400	228.390.400	215.614.200	94,41	94,41	12.776.200	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
017.28	Penelitian RKA SKPD dan RKA - P SKPD	67.000.000	67.000.000	26.360.250	39,34	39,34	40.639.750	Adanya WFH mempengaruhi serapan uang lembur serta jumlah rapat yang dilaksanakan	-
017.29	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	26.999.800	26.999.800	6.056.000	22,43	22,43	20.943.800	Adanya WFH mempengaruhi serapan uang lembur serta belanja narasumber yang tidak terserap	-
017.31	Penatusahaan Gaji Pegawai	43.856.000	43.856.000	43.196.000	98,50	98,50	660.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
021	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana	74.900.000	74.900.000	10.000.000	13,35	13,35	64.900.000		
021.05	Evaluasi ISO BPHB	74.900.000	74.900.000	10.000.000	13,35	13,35	64.900.000	Efisiensi Jasa Konsultan karena adanya Pandemi Covid 19	-



NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN KAS S.D. TRIWULAN IV	DANA TERSERAP	REALISASI KEUANGAN (%)		SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN / KENDALA	SOLUSI
					THD ANGKAS TW IV	THD TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	1.407.956.700	1.407.956.700	1.250.941.840	88,85	88,85	157.014.860		
022.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	363.850.000	363.850.000	276.151.500	75,90	75,90	87.698.500	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
022.04	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	602.266.000	602.266.000	592.434.500	98,37	98,37	9.831.500	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
022.06	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	314.994.000	314.994.000	274.260.700	87,07	87,07	40.733.300	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
022.09	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	71.999.800	71.999.800	54.511.540	75,71	75,71	17.488.260	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
022.12	Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D Online	-	-	-	-	-	-	Refocusing anggaran covid-19	Kegiatan dihapus
022.17	Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum dan Sarana Pemerintahan	54.846.900	54.846.900	53.583.600	97,70	97,70	1.263.300	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
022.18	Pembuatan Sistem Barcode Pajak Reklame	-	-	-	-	-	-	Refocusing anggaran covid-19	Kegiatan dihapus
028	Peningkatan Kualitas Perencanaan	76.700.000	76.700.000	58.151.000	75,82	75,82	18.549.000		
028.01	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	76.700.000	76.700.000	58.151.000	75,82	75,82	18.549.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
085.	Peningkatan Penerimaan PAD	3.209.780.000	3.209.780.000	2.801.455.252	87,28	87,28	408.324.748		
085.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	432.900.000	432.900.000	373.468.000	86,27	86,27	59.432.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
085.04	Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB	1.069.999.900	1.069.999.900	964.922.154	90,18	90,18	105.077.746	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
085.05	Penagihan PBB dan BPHTB	909.998.400	909.998.400	710.264.383	78,05	78,05	199.734.017	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
085.06	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	330.000.000	330.000.000	309.541.750	93,80	93,80	20.458.250	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
085.07	Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB	459.598.700	459.598.700	436.258.965	94,92	94,92	23.339.735	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
085.08	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Non PBB BPHTB	-	-	-	-	-	-	Refocusing anggaran covid-19	Kegiatan dihapus
085.09	Penyelenggaraan Operasi Gabungan dalam rangka KTMDU	7.283.000	7.283.000	7.000.000	96,11	96,11	283.000	Penyerapan sesuai kebutuhan	-
085.10	Pendataan dan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Kecamatan Cipayung	-	-	-	-	-	-	Refocusing anggaran covid-19	Kegiatan dihapus
	JUMLAH	9.564.813.500	9.564.813.500	8.094.836.043	84,63	84,63	1.469.977.457		

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

1. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor pendorong dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap kualitas pelayanan BKD.
- b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Badan dengan Walikota Depok , serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV.
- c. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

2. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Beberapa hambatan / permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya konsistensi dalam menyusun perencanaan, yaitu judul kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, antara dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA serta DPA sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- b. Kurang optimalnya penyerapan anggaran karena kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam menyusun DPA serta keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada.
- d. Terbatasnya ketersediaan anggaran belanja.

4.2. TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN / RKPD BERIKUTNYA

Berdasarkan faktor pendorong dan penghambat seperti yang telah diuraikan di atas, maka tindak lanjut bagi pelaksanaan triwulan / RKPD berikutnya adalah :



- a. Melakukan penyesuaian antara dokumen renstra dengan RKPD / Renja BKD.
- b. Melakukan kaderisasi pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
- c. Melakukan perencanaan kinerja yang lebih baik ketika menyusun RKA dan anggaran kas.
- d. Pembenahan tata kelola SDM untuk mengatasi keterbatasan SDM.
- e. Mengutamakan penganggaran kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran kinerja.
- f. Melaksanakan evaluasi internal secara rutin yang melibatkan pejabat Badan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV, dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar pencapaian target kinerja pada tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Keuangan Daerah
2. Mempertahankan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kota Depok
3. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah

5.2. REKOMENDASI

Terkait dengan tantangan pencapaian kinerja di atas, Badan Keuangan Daerah harus melakukan peningkatan kinerja di tahun mendatang melalui berbagai upaya antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, melalui upaya :
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah maupun pelayanan penatausahaan keuangan dan aset
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam membayar pajak daerah
2. Mempertahankan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kota Depok, melalui upaya :
 - a. Meningkatkan kompetensi pejabat pengelola BMD dan keuangan melalui pelatihan / bimtek
 - b. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrua
 - c. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku

- d. Menyelesaikan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK
 - e. Mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
 - f. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap seluruh proses pengelolaan APBD
 - g. Menyusun APBD dan Pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu
3. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah
- a. Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB**
 - Tertib tata kelola administrasi melalui pendaftaran objek pajak yang dilakukan validasi secara berjenjang
 - Pengembangan sistem melalui penambahan modul peta digital, transparansi capaian target secara real time - on line, integrasi pelayanan reklame dan perizinan, pendataan dan pendaftaran on line (T-Reg)
 - Meningkatkan pemeriksaan pajak
 - Merevisi peraturan perpajakan daerah (pajak air tanah, reklame dan pajak parkir)
 - Mempermudah dan memperbanyak akses pembayaran
 - Melakukan sosialisasi pentingnya pajak daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
 - Melakukan penyesuaian tarif pajak
 - Melaksanakan penegakan hukum perpajakan
 - b. Pajak PBB**
 - Pemutakhiran dan penyesuaian NJOP PBB terhadap 17 jalan protokol utama dan bidang induk kompleks / perumahan
 - Pengintegrasian sistem host - to - host dengan disdukcapil terkait pemakaian NIK wajib pajak dalam verifikasi berkas pelayanan wajib pajak
 - Pengintegrasian sistem host - to - host dengan DPMPTSP terkait data pembayaran PBB 1 tahun terakhir sebagai salah satu syarat pelayanan perijinan dan pengambilan data / luas bangunan dari DPMPTSP untuk pemutakhiran luas dan NJOP bangunan objek pajak



- Perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Depok selaku Tim Pengacara Negara terkait penagihan tunggakan kumulatif wajib pajak yang nilainya besar dan tidak korporatif

c. Pajak BPHTB

- Pengoperasian sistem web service host- to - host data untuk pengintegrasian data transaksi BPHTB dengan data BPN Kota Depok
- Pemeriksaan berkelanjutan terhadap data transaksi BPHTB yang dianalisa tidak wajar dengan cara verifikasi lapangan ke objek pajak dan konfirmasi ke wajib pajak terkait harga transaksi
- Laporan bulanan PPAT se-Kota Depok yang dapat di akses oleh BPN Kota Depok dalam memonitor jumlah transaksi BPHTB pada masing - masing PPAT
- Sistem Informasi Monitoring BPHTB On Line yang dapat diakses oleh KPP Pratama Kota Depok untuk pencocokan data BPHTB dengan data PPH